OPTIMALISASI TATA KELOLA DANA KETAHANAN PANGAN MELALUI PENDEKATAN AKUNTANSI KEPERILAKUAN: KAJIAN AKUNTABILITAS DAN TEKANAN SOSIAL

***Anita Nursanti[1], Anita Achmad Payu[2], Indra Abadi[3] , Karlina Ghazalah Rahman[4], Salsabila[5]**
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia
*Nursanti@nobel.ac.id[1], anita@stienobel-indonesia.ac.id[2], indraabadi123@gmail.com[3],
karlina@stienobel-indonesia.ac.id[4], cantikasalsabila2227@gmail.com[5]

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas dan tekanan sosial terhadap pengelolaan dana ketahanan pangan, dengan menginvestigasi *Locus of Control* sebagai variabel moderasi. Pendekatan akuntansi keperilakuan digunakan untuk menjawab kerentanan praktik kecurangan di tengah besarnya alokasi dana pemerintah. Penelitian kuantitatif ini menggunakan desain kausal-eksplanatori melalui penyebaran kuesioner kepada pejabat pengelola dana di Kota Makassar, Pare-Pare, dan Palopo yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan metode SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan *Locus of Control* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana ketahanan pangan, sementara tekanan sosial berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Lebih lanjut, *Locus of Control* tidak terbukti memoderasi hubungan antara akuntabilitas maupun tekanan sosial terhadap tata kelola dana tersebut. Kesimpulannya, pengelolaan dana sektor publik yang transparan lebih dideterminasi oleh kokohnya sistem pengendalian struktural yang absolut dan ketangguhan otonomi moral aparaturnya, di mana sistem akuntabilitas yang mapan mampu mengikat kepatuhan seluruh aparatur tanpa bergantung pada orientasi kepribadian mereka.
Kata Kunci: *Akuntabilitas, Tekanan Sosial, Locus of Control, Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan*

Abstracts: *This study aims to examine the influence of accountability and social pressure on the management of food security funds, by investigating the Locus of Control as a moderation variable. The behavioral accounting approach is used to answer the vulnerability of fraudulent practices in the midst of the large allocation of government funds. This quantitative research uses a causal-explanatory design through the distribution of questionnaires to fund management officials in Makassar, Pare-Pare, and Palopo cities selected by purposive sampling technique. Data analysis was carried out using the SEM-PLS method. The results showed that accountability and Locus of Control partially had a positive and significant effect on the management of food security funds, while social pressure had a negative but insignificant effect. Furthermore, the Locus of Control has not been shown to moderate the relationship between accountability and social pressure on the governance of the fund. In conclusion, the transparent management of public sector funds is determined by the robustness of the absolute structural control system and the resilience of the moral autonomy of the apparatus, where an established accountability system is able to bind the compliance of all apparatus without depending on their personality orientation*
Keywords:*Accountability, Social Pressure, Locus of Control, Management of Food Security Funds*

1. Pendahuluan

Program ketahanan pangan merupakan prioritas strategis dalam agenda pembangunan nasional, termasuk dalam implementasi Asta Cita terkait kemandirian dan teknologi pangan. Komitmen ini tercermin dari besarnya alokasi anggaran ketahanan pangan pada APBN 2024 yang mencapai Rp114,3 triliun. Namun, besarnya dana tersebut memunculkan kerentanan jika tidak diimbangi dengan tata kelola dan akuntabilitas yang ketat. Realitas di lapangan menunjukkan adanya celah kecurangan; berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2023, sektor pemerintahan desa yang menjadi salah satu ujung tombak alokasi dana ketahanan pangan mencatat angka korupsi tertinggi di Indonesia dengan 187 kasus dan kerugian negara mencapai Rp162,25 miliar (Anisah et al., 2023). Fakta empiris ini mengindikasikan bahwa regulasi formal saja tidak cukup. Akuntabilitas publik tidak hanya sebatas kepatuhan administratif yang dipercaya dapat meningkatkan efektivitas program, melainkan

juga sangat dipengaruhi oleh aspek keperilakuan pengelolanya(Esmaeili et al., 2025). Dalam praktiknya, perilaku individu pengelola dana rentan dipengaruhi oleh tekanan sosial dari berbagai pemangku kepentingan seperti atasan, rekan sejawat, masyarakat, hingga media. Tekanan sosial ini pada akhirnya bersifat paradoksal; ia dapat menjadi mekanisme kontrol yang mendorong transparansi, namun di sisi lain berpotensi memicu perilaku disfungsional jika ekosistem etika dan sistem pengendalian internal tidak memadai (Andayani et al., 2024).

Pendekatan akuntansi keperilakuan (*behavioral accounting*) menawarkan lensa analitis yang sangat krusial untuk mengurai kompleksitas tata kelola dana publik. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang mengasumsikan rasionalitas penuh dari agen ekonomi, akuntansi keperilakuan menyadari bahwa proses pengambilan keputusan keuangan sangat rentan terhadap intervensi faktor psikologis dan lingkungan sosial (Owen Brown & Deng, 2025). Dalam praktiknya, pengelola dana ketahanan pangan tidak beroperasi di ruang hampa; mereka terus-menerus dihadapkan pada dinamika lingkungan kerja, hierarki birokrasi, dan ekspektasi pemangku kepentingan yang memunculkan tekanan sosial (*social pressure*). Tekanan dari atasan maupun rekan sejawat ini kerap kali menjadi justifikasi bagi individu untuk berkompromi, menyimpang dari prosedur standar, atau bahkan merasionalisasi tindakan disfungsional demi memenuhi tuntutan lingkungan di sekitarnya.

Akuntabilitas dalam konteks ini hadir tidak hanya sebagai prosedur administratif, tetapi sebagai mekanisme penyeimbang psikologis. Secara teoritis, persepsi akuntabilitas yang melekat pada diri pengelola seharusnya mampu memitigasi dampak negatif dari tekanan sosial tersebut. Namun, benturan langsung antara kuatnya tekanan sosial komunal dan tuntutan pertanggungjawaban rasional ini sering kali menciptakan dilema etis yang berujung pada kerentanan *fraud*. Evaluasi terhadap program pemerintah tidak lagi cukup hanya dengan melihat kelengkapan bukti transaksi, melainkan harus mendalami sejauh mana ketahanan mental aparatur mampu mempertahankan integritas pelaporan ketika dihadapkan pada tekanan lingkungan yang terinstitusionalisasi .

Urgensi pendekatan ini sangat tinggi, namun diskursus akademik yang mengkaji interaksi spesifik antara persepsi akuntabilitas, tekanan sosial, dan dampaknya terhadap perilaku pengelolaan dana masih sangat terbatas. Mayoritas penelitian terdahulu cenderung berfokus pada determinan kepatuhan administratif semata atau dilakukan pada sektor korporasi privat. Hal ini meninggalkan celah penelitian (*research gap*) yang signifikan, khususnya pada konteks tata kelola dana ketahanan pangan yang terintegrasi dengan visi strategis prioritas nasional seperti program Asta Cita. Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan menguji model empiris yang tidak hanya mengevaluasi sistem, tetapi juga mengukur akar perilaku manusianya dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

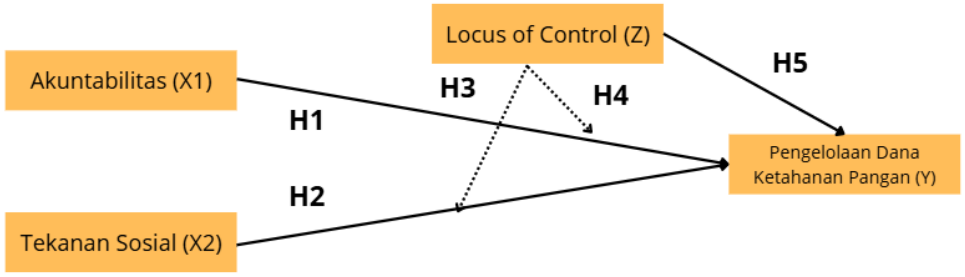
Akuntabilitas publik telah menjadi indikator penting dalam menilai kinerja sektor publik. Penelitian oleh (Sjarlis et al., 2025) menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dengan peningkatkan kinerja sektor publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh sistem dan prosedur formal, tetapi juga oleh faktor perilaku yang terlibat dalam proses pengelolaan dana (Adu-Gyamfi et al., 2025). Akuntansi keperilakuan sebagai salah satu konstruksi akuntansi baru memainkan peran penting dalam memahami persepsi pribadi terhadap tanggung jawab, serta tekanan sosial dari atasan, rekan kerja, dan lingkungan masyarakat sehingga dapat memengaruhi tindakan aktor publik. Seperti dijelaskan oleh (Clarke, 2011), tekanan sosial dapat berfungsi sebagai pengontrol informal yang mendorong individu untuk bertindak sesuai norma etika dan transparansi, namun juga dapat menyebabkan tekanan psikologis yang memicu perilaku disfungsional dalam pelaporan dan pengambilan keputusan.

Beberapa penelitian lain justru menemukan hasil yang berlawanan, yakni akuntabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja tata kelola dana maupun pencegahan *fraud* (Putri et al., 2023). Fenomena ini mengindikasikan bahwa kepatuhan administratif semata tidak cukup untuk meredam penyimpangan, terutama jika individu pengelola berada di bawah bayang-bayang tekanan sosial dari lingkungan organisasinya.

Penelitian ini urgen dilakukan untuk memberikan fondasi tata kelola yang kuat bagi ketahanan pangan. Sebagian besar literatur cenderung menyoroti akuntabilitas dalam konteks pelaporan keuangan atau audit, dan belum banyak yang menguji pengaruh faktor-faktor psikososial terhadap perilaku pengolaan anggaran publik secara langsung. Sehingga, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperdalam kajian empiris tentang persepsi akuntabilitas dan tekanan sosial terhadap pengelolaan

e-ISSN: 3026-6653
p-ISSN: 3026-6661

dana ketahanan pangan yang terbatas. Adapun kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2. Landasan Teori

Theory of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang digagas oleh Ajzen tahun 1991 mempostulatkan bahwa niat dan tindakan seseorang tidak muncul secara spontan, melainkan dapat diprediksi melalui tiga determinan utama (Allen et al., 2026). Pertama, sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*), yakni evaluasi personal individu yang memandang suatu tindakan sebagai hal yang menguntungkan atau merugikan. Kedua, norma subjektif (*subjective norm*), yang merepresentasikan besarnya tekanan sosial atau dukungan dari lingkungan sekitar yang dirasakan oleh individu. Ketiga, kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*), yaitu tingkat keyakinan seseorang mengenai kemudahan atau kesulitan dalam merealisasikan tindakan tersebut. Menurut Ajzen, kombinasi antara evaluasi sikap yang positif, kuatnya dukungan sosial, serta persepsi ketiadaan hambatan yang berarti akan secara signifikan meningkatkan probabilitas niat individu untuk mewujudkan suatu perilaku .

Akuntabilitas

Akuntabilitas pada dasarnya merupakan prinsip etis yang melekat erat pada instansi administrasi publik, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Konsep ini merepresentasikan tanggung jawab dan ekspektasi organisasi, yang sering disejajarkan dengan kemampuan memberikan jawaban atas kinerja, kesiapan untuk dievaluasi, serta kewajiban yang mengikat. Dalam praktiknya, akuntabilitas menjadi pilar krusial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Rahman, 2021). Hal ini terutama terlihat dalam tata kelola anggaran yang berdampak langsung pada kepentingan masyarakat dan keberlangsungan organisasi. Oleh karena itu, akuntabilitas secara praktis dimaknai sebagai kewajiban mutlak suatu instansi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap pencapaian maupun kegagalan pencapaian tujuan secara periodik melalui sistem pelaporan formal. Indikator pengukuran variabel ini adalah transparansi pelaporan, kepatuhan pada regulasi, dan pertanggungjawaban vertikal dan horizontal

Tekanan Sosial

Tekanan sosial merupakan suatu dorongan psikologis dan situasional yang dialami oleh individu akibat adanya tuntutan, ekspektasi, atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Dalam konteks tata kelola organisasi dan akuntansi keperilakuan, tekanan sosial bermanifestasi melalui pengaruh hierarkis dari atasan (*obedience pressure*), budaya kerja rekan sejawat (*peer pressure*), maupun tuntutan eksternal dari masyarakat. Tekanan ini beroperasi sebagai mekanisme pengondisian perilaku di mana individu merasa terikat untuk menyesuaikan tindakan, keputusan, atau pelaporan keuangannya dengan norma yang diyakini oleh kelompok dominan (M Doan et al., 2026). Meskipun secara ideal tekanan sosial dapat berfungsi sebagai kontrol eksternal yang mendorong pengawasan, realitas operasional menunjukkan bahwa tingginya tekanan komunal sering kali memaksa individu untuk berkompromi

dengan standar etika, mengabaikan prosedur pengendalian internal, dan pada akhirnya bermuara pada rasionalisasi tindakan disfungsional atau kecurangan (*fraud*). Indikator pengukuran untuk variabel ini adalah tekanan dari atasan, tekanan rekan sejawat, dan tekanan lingkungan eksternal.

Locus of Control

Konsep *Locus of Control* yang pertama kali dikemukakan oleh Rotter tahun 1966 merupakan konstruk fundamental dalam psikologi kepribadian yang merepresentasikan sejauh mana individu meyakini bahwa mereka memiliki kendali atas rentetan peristiwa dan hasil dalam hidup mereka. Dalam literatur akuntansi keperilakuan, konstruk ini diklasifikasikan ke dalam dua dimensi polar, yakni internal dan eksternal. Individu dengan *Locus of Control* internal meyakini bahwa setiap keputusan, keberhasilan, maupun kegagalan dideterminasi oleh kapasitas, integritas, serta prinsip etika diri sendiri, sehingga mereka cenderung memiliki otonomi moral yang teguh (Almomani & Onur, 2026). Sebaliknya, individu dengan *Locus of Control* eksternal mengatribusikan tindakan dan nasib mereka pada faktor di luar kendali personal, seperti takdir, cacatnya sistem birokrasi, atau intervensi hierarki otoritas. Dalam konteks tata kelola keuangan publik, *Locus of Control* berfungsi sebagai filter kognitif yang sangat esensial; di mana aparatur pengelola dana dengan determinasi internal yang dominan diyakini memiliki ketangguhan psikologis (*resilience*) yang lebih tinggi untuk meredam dominasi tekanan sosial maupun instruksi disfungsional dari pimpinan, sehingga secara teoritis mampu memitigasi niat kecurangan (*fraud*) dan menjaga akuntabilitas organisasional (Xu et al., 2026).

Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan

Pengelolaan dana ketahanan pangan merujuk pada serangkaian siklus manajerial keuangan yang mencakup tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas alokasi dana yang ditujukan untuk sektor pangan. Dana ini merupakan instrumen fiskal strategis pemerintah baik di tingkat pusat, daerah, maupun desayang dialokasikan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas konsumsi pangan masyarakat (Cao & Li, 2026). Secara ideal, tata kelola dana ini menuntut kepatuhan administratif yang ketat terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan regulasi yang berlaku. Sistem pengendalian internal yang efektif diwajibkan dalam setiap tahapan penyaluran dana guna memastikan bahwa alokasi anggaran tepat sasaran, terhindar dari pemborosan (*inefficiency*), dan bebas dari praktik penyelewengan (*fraud*) (Rahman & Rachma, 2025). Indikator pengukuran untuk variabel ini adalah niat melakukan *fraud* dan perilaku disfungsional.

Research Gap

Penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas sektor publik umumnya didominasi oleh perspektif institusional dan normatif administratif yang berfokus pada kepatuhan terhadap regulasi pelaporan keuangan semata. Sebagian besar studi yang ada mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana desa atau anggaran daerah (APBD) secara umum dengan menggunakan variabel kinerja keuangan dan pengendalian internal sebagai indikator keberhasilan (Rahman, 2020). Disisi lain, kajian yang bertemakan ketahanan pangan khususnya konteks program nasional cenderung menitikberatkan pada aspek teknis agronomi, rantai pasok logistik, atau dampak makroekonomi, namun sangat jarang menyentuh dimensi manusia dibalik pengelolaan dananya. Terdapat disparitas yang nyata dimana aspek psikologis atau perilaku aparatur pengelolaan dana seringkali terabaikan dalam diskursus tata kelola ketahanan pangan, padahal faktor manusialan yang menjadi penentu utama terjadinya inefisiensi atau penyimpangan anggaran (Khan et al., 2026).

3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain kausal-eksplanatori untuk menguji model optimalisasi tata kelola dana. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan kuesioner untuk menghasilkan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat pengelola dana ketahanan pangan pada Pemerintah Kota Makassar, Parepare, dan Palopo, khususnya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Bappeda, yang berjumlah 55 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut.

1) Pejabat pembuat komitmen
2) Pejabat pelaksana teknis kegiatan

3) Bendahara pengeluaran / penerimaan yang bertanggung jawab atas perputaran dana

Berdasarkan kriteria tersebut, kuesioner disebarkan kepada 55 responden, dan sebanyak 47 kuesioner kembali serta layak diolah, sehingga tingkat pengembalian kuesioner (*response rate*) sebesar 85,45%. Model penelitian ini terdiri atas empat variabel dan lima hipotesis, dengan lima jalur struktural yang mengarah pada variabel Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y), yaitu Akuntabilitas, Tekanan Sosial, *Locus of Control*, serta dua variabel interaksi moderasi. Kecukupan sampel diuji melalui analisis kekuatan statistik (*power analysis*) dengan lima prediktor, ukuran efek besar (f^2 = 0,35), tingkat signifikansi 5%, dan kekuatan statistik 80% (Cohen, 1992), yang menghasilkan ukuran sampel minimum sebanyak 43 responden. Dengan demikian, 47 sampel dalam penelitian ini telah memadai untuk dianalisis menggunakan SEM-PLS.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan *structural equation modeling – partial least square* (SEM-PLS) dengan bantuan *software* SmartPLS Versi 4. Analisis SEM adalah analisis persamaan struktur yang berbasis komponen atau varian.

4. Hasil Dan Pembahasan

Hasil

Uji Validitas Konvergen

Evaluasi validitas konvergen dalam penelitian ini didasarkan pada dua parameter utama, yakni nilai *loading factor* dan *Average Variance Extracted* (AVE). Merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh Hair et al. (2017), sebuah indikator pengukuran dinyatakan valid dan layak dipertahankan di dalam model apabila memiliki nilai *loading factor* lebih dari 0,7. Sebaliknya, indikator dengan nilai di bawah ambang batas tersebut akan dieliminasi. Berdasarkan hasil estimasi data menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4, rincian nilai *loading factor* untuk setiap indikator disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji *Loading Factor*

	Outer loadings
X1.1 <- Akuntabilitas (X1)	0,884
X1.2 <- Akuntabilitas (X1)	0,962
X1.3 <- Akuntabilitas (X1)	0,876
X1.4 <- Akuntabilitas (X1)	0,893
X1.5 <- Akuntabilitas (X1)	0,873
X2.1 <- Tekanan Sosial (X2)	0,872
X2.2 <- Tekanan Sosial (X2)	0,870
X2.3 <- Tekanan Sosial (X2)	0,917
X2.4 <- Tekanan Sosial (X2)	0,815
X2.5 <- Tekanan Sosial (X2)	0,834
Y.1 <- Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y)	0,910
Y.2 <- Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y)	0,899
Y.3 <- Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y)	0,851
Y.4 <- Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y)	0,925
Y.5 <- Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y)	0,877
Z.1 <- *Locus of Control* (Z)	0,853
Z.2 <- *Locus of Control* (Z)	0,945
Z.3 <- *Locus of Control* (Z)	0,895
Z.4 <- *Locus of Control* (Z)	0,894
Z.5 <- *Locus of Control* (Z)	0,927

Sumber : Data diolah SmartPLS (2026)

Berdasarkan tabel diatas, hasil pengujian *loading factor* untuk model ini menunjukkan semua indikator yang menjadi representasi masing-masing variabel valid dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

e-ISSN: 3026-6653
p-ISSN: 3026-6661

Uji *Average Variance Extracted* (AVE)

Validitas konvergen juga dievaluasi menggunakan metrik *loading factor* dan *Average Variance Extracted* (AVE). Sebuah konstruk dinyatakan memenuhi syarat validitas konvergen yang memadai jika memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,5. Adapun hasil estimasi nilai AVE untuk masing-masing variabel disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji *Average Variance Extracted* (AVE)

	Composite reliability (*rho_c*)	Average variance extracted (AVE)
Akuntabilitas (X1)	0,954	0,807
Locus of Control (Z)	0,957	0,816
Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y)	0,951	0,797
Tekanan Sosial (X2)	0,936	0,744

Sumber : Data diolah SmartPLS (2026)

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai AVE penelitian semuanya memiliki hasil >0.5, sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap variabel model pengukuran ini valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan tahapan krusial dalam evaluasi *outer model* guna memastikan keandalan instrumen penelitian. Penilaian ini didasarkan pada dua metrik pengujian, yaitu *Cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Syarat utama untuk menyimpulkan bahwa instrumen telah reliabel adalah jika perolehan nilai pada kedua metrik tersebut melebihi angka 0,70. Tabel 3 di bawah ini menguraikan hasil kalkulasi pengujian reliabilitas dari model yang digunakan.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

	Cronbach's alpha	*Composite reliability* (*rho_a*)
Akuntabilitas (X1)	0,940	0,946
Locus of Control (Z)	0,943	0,947
Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y)	0,936	0,938
Tekanan Sosial (X2)	0,914	0,917

Sumber : Data diolah SmartPLS (2026)

Interprestasi tabel 3 menunjukkabn bahwa nilai cronbach's alpha dan *composite reliability* menghasilkan nilai > 0,70 sehingga dapat dikatakan bahwa semua data dalam penelitian ini sangat reliabel.

Uji Structural Model

1. Uji Koefisien Determinasi

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan dengan meninjau nilai koefisien determinasi (R^2) guna mengetahui persentase fluktuasi variabel dependen (Y) yang dipengaruhi oleh variabel independen (X). Parameter penilaian ini merujuk pada tiga tingkatan: nilai lebih dari 0,67 mengindikasikan model prediktif yang kuat, nilai di antara 0,19 sampai 0,67 menunjukkan model yang moderat, sedangkan nilai di bawah 0,19 masuk dalam kategori rendah. Rincian hasil kalkulasi pengujian koefisien determinasi tersebut dapat diamati pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

	R-square	*R-square adjusted*
Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y)	0,835	0,820

Sumber : Data diolah SmartPLS (2026)

e-ISSN: 3026-6653
p-ISSN: 3026-6661

Berdasarkan nilai R^2 untuk variabel Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan memiliki nilai 0.,835 yang dimana menunjukkan bahwa model termasuk dalam kategori kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa sebesar 83,5% model yang dibangun antara Akuntabilitas (X1), Tekanan Sosial (X2), *Locus of Control* (Z) sebagai variabel mediasi terhadap Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y) dibangung sangat kuat.

2. Uji *Effect Size*

Untuk mengukur substansi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen, penelitian ini mengaplikasikan analisis ukuran efek atau *effect size* (f^2). Parameter penilaian besaran pengaruh tersebut dibagi menjadi tiga ambang batas kategori. Suatu efek dikatakan kecil apabila nilai f^2 berada di antara 0,02 hingga di bawah 0,15. Selanjutnya, pengaruh dikategorikan moderat pada interval 0,15 hingga di bawah 0,35. Terakhir, variabel dinyatakan memiliki sumbangsih pengaruh yang besar jika mencatatkan nilai f^2 sebesar 0,35 atau lebih.

Tabel 5. Hasil Uji *Effect Size*

	f-square	Hasil
Akuntabilitas (X1) -> Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y)	0,273	Moderat
Locus of Control (Z) -> Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y)	0,191	Moderat
Tekanan Sosial (X2) -> Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y)	0,013	Kecil
Locus of Control (Z) x Tekanan Sosial (X2) -> Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y)	0,022	Kecil
Locus of Control (Z) x Akuntabilitas (X1) -> Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y)	0,009	Kecil

Sumber : Data diolah SmartPLS (2026)

Uji Hipotesis

Keputusan pengujian hipotesis didasarkan pada peninjauan nilai *path coefficient*, *t-statistic*, serta *p-value*. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai *t-statistic* melebihi ambang batas *t-tabel* yang bernilai 1,681. Menggunakan tingkat keyakinan 95% dan tingkat signifikansi 5%, pengaruh antarvariabel disimpulkan signifikan secara statistik jika nilai *p-value* < 0,05. Hasil pengujian hipotesis selengkapnya disajikan di bawah ini.

1. Uji *Path Coefficient* dan *Path Value* (Pengaruh Langsung)

Tabel 6. Hasil Uji *Path Coefficient* dan *Path Value* (Pengaruh Langsung)

Hipotesis	*Path Coefficient*	t-statistik	*p-value*	Hasil
H1 : Akuntabilitas (X1) > Pengelolaan Dana Ketahanana Pangan (Y)	**0.540**	**2,510**	**0,012**	**H1 diterima**
H2 : Tekanan Sosial (X2) > Pengelolaan Dana Ketahanana Pangan (Y)	**-0,244**	**0.902**	**0,365**	**H2 diterima**
H5 : *Locus of Control* (Z) > Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y)	**0,706**	**2,858**	**0,004**	**H5 diterima**

Sumber : Data diolah SmartPLS (2026)

e-ISSN: 3026-6653
p-ISSN: 3026-6661

Berdasarkan tabel diatas, semua hipotesis yang merupakan pengaruh langsung diterima. Adapun hipotesis yang diterima adala (1) Akuntabilitas (X1) berpengaruh positif dan siginifikan terhadap pengelolaan dana ketahanan pangan (Y) memiliki koefisien jalur yang bernilai positif sebesar 0.540 dengan nilai *p-value* 0,012<0.05; (2) Tekanan Sosial (X2) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengelolaan dana ketahanan pangan (Y) memiliki koefisin jalur yang bernilai negatif sebesar 0,244 dengan nilai *p-value* 0,365>0.05; dan (3) *Locus of Control* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana ketahanan pangan (Y) memiliki nilai koefisien jalur yang bernilai positif sebesar 0,706 dengan *p-value* 0,004<0,05.

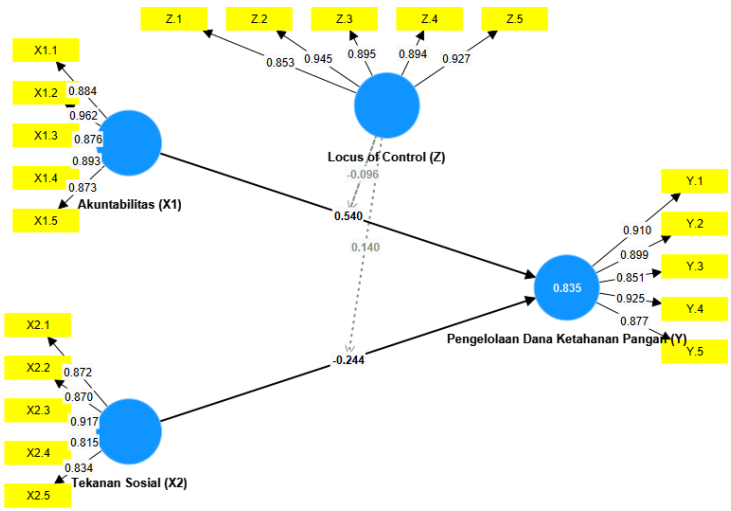
2. Uji *Path Coefficient* dan *Path Value* (Pengaruh Mediasi)

Tabel 7. Hasil *Path Coefficient* dan *Path Value* (Pengaruh Mediasi)

Hipotesis	*Path Coefficient*	t-statistik	*p-value*	Hasil
H3 : *Locus of Control* (Z) x Akuntabilitas (X1) -> Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y)	**-0,096**	**0,424**	**0,672**	**H3 ditolak**
H4 : *Locus of Control* (Z) x Tekanan Sosial (X2) -> Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y)	**0,140**	**0,687**	**0,492**	**H4 diterima**

Sumber : Data diolah SmartPLS (2026)

Berdasarkan tabel diatas, maka 1 dari 2 hipotesis moderasi yang diajukan diterima. Hipotesis 3 ditolak menyatakan bahwa *Locus of Control* (Z) tidak memoderasi hubungan antara Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y) dimana memiliki nilai t hitung 0,424 < t tabel 1,681 dengan *p-value* 0,672>0,05. Sebaliknya, Hipotesis 4 diterima menyatakan bahwa *Locus of Control* tidak memoderasi hubungan antara Tekanan Sosial terhadap Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan (Y) dimanan memiliki nilai t hitung 0,687 < t tabel 1,681 dengan *p-value* 0,492 > 0,05.



Gambar 2. *Output* SEM-PLS

Pembahasan

1. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap optimalisasi pengelolaan dana ketahanan pangan di Sulawesi Selatan, di mana transparansi dan pertanggungjawaban yang ketat terbukti meminimalisasi ruang penyimpangan sehingga karakteristik program di wilayah seperti Kota Makassar, Parepare, dan Palopo dapat terealisasi secara efisien dan tepat sasaran. Secara konseptual, perwujudan tata kelola yang berintegritas ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB), di mana akuntabilitas terinternalisasi dari sekadar kewajiban administratif menjadi determinan psikologis yang membentuk sikap (*attitude*) kepatuhan, memperkuat norma subjektif (*subjective norm*) berbasis integritas, dan secara langsung meningkatkan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) untuk mengeliminasi niat disfungsional aparatur. Temuan empiris ini sekaligus mengonfirmasi penelitian (Bibitan et al., 2026), yang menegaskan bahwa penegakan instrumen akuntabilitas formal yang terstruktur merupakan pilar pencegahan dini yang signifikan dalam menekan penyimpangan demi tercapainya sasaran program sektor publik yang optimal.

2. Pengaruh Tekanan Sosial terhadap Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan sosial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pengelolaan dana ketahanan pangan di ketiga wilayah penelitian. Ketidaksignifikanan ini mengindikasikan bahwa meskipun aparatur menghadapi desakan komunal atau dilema etis, ketatnya sistem pengendalian internal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) berhasil bertindak sebagai perisai yang menetralisasi tekanan tersebut. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), anomali ini membuktikan bahwa kognisi aparatur jauh lebih didominasi oleh elemen persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*)—berupa ketakutan terhadap sanksi administratif dan temuan audit—dibandingkan elemen norma subjektif (*subjective norm*) dari lingkungan kerjanya. Akibatnya, aparatur lebih memprioritaskan mitigasi risiko sanksi hukum dan mempertahankan integritas dibandingkan tunduk pada ekspektasi sosial yang menyimpang. Temuan empiris ini sejalan dengan penelitian (LIMBA et al., 2020), yang mengonfirmasi bahwa dalam lingkungan institusi pemerintahan dengan regulasi struktural yang rigid, variabel tekanan komunal kehilangan daya signifikansinya dalam memicu perilaku disfungsional karena tereduksi oleh kuatnya kepatuhan formal.

3. Pengaruh Locus of Control terhadap Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Locus of Control* (LoC) berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan dana ketahanan pangan di Kota Makassar, Parepare, dan Palopo. Merujuk pada konsep Rotter (1966), aparatur dengan orientasi LoC internal yang dominan meyakini bahwa keberhasilan program dan kepatuhan administratif merupakan hasil dari usaha dan integritas mandiri, bukan kendali faktor eksternal. Karakteristik intrinsik ini bertransformasi menjadi mekanisme pengendalian diri (*self-control mechanism*) yang membekali aparatur dengan otonomi moral serta ketangguhan psikologis (*resilience*) untuk tetap independen dalam menolak desakan disfungsional atau tekanan komunal lingkungan kerjanya. Secara konseptual dalam lensa *Theory of Planned Behavior* (TPB), tingginya LoC internal ini secara drastis memperkuat elemen kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*), di mana aparatur merasa memiliki kapasitas penuh untuk patuh pada standar operasional terlepas dari berbagai intervensi pihak luar. Temuan empiris ini secara kohesif mengonfirmasi penelitian (Carrim et al., 2020), yang membuktikan bahwa dominasi LoC internal secara efektif meningkatkan resistensi aparatur terhadap dilema etis, sehingga bermuara pada perwujudan tata kelola keuangan publik yang berintegritas dan tepat sasaran.

4. *Locus of Control* memoderasi Pengaruh Akuntanbilitas terhadap Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa *Locus of Control* tidak terbukti memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana ketahanan pangan di Sulawesi Selatan. Ketidaksignifikanan efek moderasi ini mengindikasikan bahwa sistem akuntabilitas institusional yang diterapkan telah berjalan sangat rigid dan mapan, sehingga efektivitasnya dalam mewujudkan tata kelola dana yang optimal bersifat universal dan tidak lagi bergantung pada variasi orientasi kepribadian aparaturnya. Secara konseptual, temuan ini dapat dijelaskan secara mendalam melalui kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), di mana ketatnya regulasi dan kewajiban pelaporan bertindak sebagai kekuatan eksternal yang sepenuhnya mendominasi pembentukan kontrol perilaku yang dipersepsikan

(*perceived behavioral control*). Dominasi kontrol struktural dari akuntabilitas ini sukses mempersempit ruang diskresi perilaku, sehingga seluruh aparatur baik yang memiliki *Locus of Control* internal yang proaktif maupun yang cenderung eksternal dan pasif tetap terikat secara paksa untuk mematuhi standar operasional tanpa memerlukan penguatan dari dorongan psikologis intrinsik mereka. Temuan empiris ini relevan dan memperkuat argumen pada penelitian terdahulu (Ojha et al., 2026), yang mengonfirmasi bahwa dalam entitas pemerintahan dengan instrumen tata kelola yang sangat ketat, kekuatan sistem pengendalian formal akan selalu mengungguli perbedaan karakteristik kepribadian individu dalam mendikte kepatuhan, sehingga pengelolaan anggaran publik dapat terjamin ketepatan sasarannya murni berkat ketangguhan sistem itu sendiri.

5. *Locus of Control* memoderasi Pengaruh Tekanan Sosial terhadap Pengelolaan Dana Ketahanan Pangan

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa *Locus of Control* tidak terbukti memoderasi hubungan antara tekanan sosial terhadap pengelolaan dana ketahanan pangan. Ketidaksignifikanan efek moderasi ini mengindikasikan bahwa dampak dari tekanan sosial baik dari atasan maupun rekan sejawat terhadap perilaku tata kelola dana bersifat konstan, tanpa diperkuat maupun diperlemah oleh orientasi kepribadian aparatur di lapangan. Jika dikaji melalui kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), fenomena ini memperlihatkan bahwa elemen norma subjektif (*subjective norm*) yang direpresentasikan oleh tekanan sosial beroperasi secara independen dari elemen kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) yang melekat pada *Locus of Control* individu. Artinya, ketika aparatur dihadapkan pada desakan komunal atau instruksi lingkungan kerja, respons perilaku mereka tidak ditentukan oleh seberapa tangguh otonomi psikologis (internal) atau seberapa rentan (eksternal) kepribadian yang mereka miliki, melainkan lebih didikte oleh kalkulasi rasional terhadap kuatnya sistem birokrasi dan hierarki itu sendiri. Temuan ini sejalan dan mengonfirmasi penelitian terdahulu (Anastasia & Lasdi, 2022), yang menegaskan bahwa dalam entitas sektor publik dengan regulasi struktural yang rigid, karakteristik kepribadian individu sering kali kehilangan daya moderasinya karena pengaruh norma serta tekanan eksternal akan direspons secara seragam oleh seluruh pegawai, murni berdasarkan batasan kewenangan administratif yang ada.

5. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian pengujian empiris, penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pengelolaan dana ketahanan pangan di Kota Makassar, Parepare, dan Palopo dideterminasi oleh kokohnya sistem pengendalian struktural dan ketangguhan otonomi moral aparatur. Akuntabilitas terbukti menjadi pilar utama yang berpengaruh positif dan signifikan dalam memastikan kepatuhan administratif, sementara tekanan sosial terbukti tidak signifikan memicu penyimpangan karena berhasil dinetralisasi oleh ketatnya regulasi dan risiko sanksi formal. Lebih lanjut, meskipun kepribadian *Locus of Control* internal terbukti secara langsung mampu meningkatkan integritas dan mekanisme pengendalian diri aparatur, variabel ini justru tidak terbukti memoderasi pengaruh akuntabilitas maupun tekanan sosial.

Ketidaksignifikan efek moderasi ini memberikan penegasan konseptual bahwa instrumen tata kelola yang mapan mampu bekerja secara absolut dan universal untuk mengikat kepatuhan seluruh aparatur, tanpa bergantung pada variasi orientasi kepribadian mereka. Dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB), konstelasi temuan ini membuktikan bahwa kuatnya kontrol eksternal (sistem pelaporan) yang diimbangi dengan tingginya kontrol perilaku internal (*perceived behavioral control*) merupakan kunci esensial dalam mengeliminasi niat disfungsional, sehingga bermuara pada perwujudan tata kelola dana sektor publik yang transparan, profesional, dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

Adu-Gyamfi, S., Brenya, E., Mills, G. B., & Apau, D. (2025). Ghana's Right to Information Act and public sector information accessibility. *IFLA Journal*, *51*(4), 899–911. https://doi.org/10.1177/03400352241301779

Allen, S., Volschenk, J., & de Klerk, J. J. (2026). Employees' environmental initiative participation: the role of values, ecological worldview and cost-benefit perceptions. *International Journal of Manpower*, *47*(10), 62–82. https://doi.org/10.1108/IJM-06-2023-0342

Almomani, M., & Onur, I. (2026). Locus of control and volunteering among older individuals in Europe. *Journal of Economic Studies*, *53*(9), 80–96. https://doi.org/10.1108/JES-07-2025-0527

Anastasia, D., & Lasdi, L. (2022). THE EFFECT OF COMPENSATION SCHEMES, OBEDIENCE PRESSURE, AND SELF-EFFICACY ON BUDGETARY SLACK. *Journal of Applied Finance & Accounting*, *9*(2). https://doi.org/10.21512/jafa.v9i2.8291

Andayani, W., Sutrisno, T., Prayudi, M. A., Wuryantoro, M., & Sidarta, A. L. (2024). Experimental Study of the Influence of the Level of Religious and Moral Reasoning on Fraudulent Financial Reporting Behavior. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*, *22*(1), 4356–4370. https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.1.00319

Anisah, A., Lovadena, A., Atikahasri, H., Nurul, U., Peninjau, Q., Sunaryanto, A., & Juliantari, S. (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023 Penulis: Diky Anandya Kurnia Ramdhana*.

Bibitan, R. A., Tuli, H., & Pakaya, L. (2026). Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi Anggaran, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Desa-Desa Di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, *5*(1), 64–80. https://doi.org/10.56672/

Cao, Y., & Li, Z. (2026). Top management's financial experience, backgrounds in regulatory and non-regulatory financial institutions, and corporate tax aggressiveness. *Journal of Accounting Literature*, *48*(5), 159–211. https://doi.org/10.1108/JAL-06-2025-0292

Carrim, N. M., Nel, J. A., & Schoeman, R. (2020). *Occupational Stress in South African Work Culture*. *SpringerBriefs in Psychology*. https://doi.org/10.1007/978-981-33-6397-7

Clarke, C. E. (2011). A case of conflicting norms? mobilizing and accountability information in newspaper coverage of the autism-vaccine controversy. *Public Understanding of Science*, *20*(5), 609–626. https://doi.org/10.1177/0963662509359490

Cohen, J. (1992). A power primer. *Psychological Bulletin*, *112*(1), 155–159. https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155

Esmaeili, S., Peikanpour, M., & Peiravian, F. (2025). Development and Assessment of a Decentralization Framework in Iran Pharmaceutical Regulatory Systems Based on Good Governance Indicators. *Iranian Journal of Pharmaceutical Research*, *24*(1). https://doi.org/10.5812/ijpr-165508

Khan, M. A., Zahir, S., & Saleem, S. F. (2026). The role of inflation and institutional quality in shaping healthcare expenditure: Insights from Asia–Pacific countries. *International Economics and Economic Policy*, *23*(1). https://doi.org/10.1007/s10368-025-00698-0

LIMBA, F. B., SAPULATTE, S. G., & USMANY, A. E. M. (2020). AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM THEORY OF PLANNED BEHAVIOR. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, *9*(2), 35–47. https://doi.org/10.32520/JAK.V9I2.1310

M Doan, L. T., Minh City, C., Chi Minh City, H., & Dang-Van, T. (2026). The influence of information similarity overload on users' withdrawal behaviour from social communities on SNSs. *BMC Psychology 2026 14:1*, *14*(1), 630-. https://doi.org/10.1186/S40359-026-04384-X

Ojha, A., Mahesh, V., Krishnamoorthy, R., Zaidi, T., Suneetha, K., Ojha, A., Mahesh, V., Krishnamoorthy, R., Zaidi, T., & Suneetha, K. (2026). Community-Based Crime Surveillance Network: Empowering Citizens With NavIC-Integrated Drones and Blockchain. *Https://Services.Igi-Global.Com/Resolvedoi/Resolve.Aspx?Doi=10.4018/979-8-3373-4277-1.Ch004*, 117–146. https://doi.org/10.4018/979-8-3373-4277-1.CH004

Owen Brown, J., & Deng, E. K. (2025). The Ties That Bind: A Systematic Review of Behavioral Research on Social Bonds and Social Ties in Accounting. *Behavioral Research in Accounting*, *37*(2), 1–26. https://doi.org/10.2308/BRIA-2023-047

Putri, A. Y. A., Irawan, D., & Widyastuti, A. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kecamatan Panekan. *Review of Applied Accounting Research (RAAR)*, *3*(2), 71–90. https://doi.org/10.30595/RAAR.V3I2.20117

Rahman, K. G. (2020). Sistem Pengendalian Internal dan Peran Audit Internal terhadap Pencegahan Kecurangan. *BJRA*, *3*(1). https://doi.org/https://doi.org/10.37888/bjra.v3i1.207

Rahman, K. G. (2021). *Good Governance dan Pengendalian Internal pada Kinerja Pengelolaan Keuangan*. Edu Publisher.

Rahman, K. G., & Rachma, N. (2025). Optimizing Government Internal Audits through the Implementation of Blockchain Technology for Fraud Prevention. *Research Horizon*, *5*(6), 2317–2330. https://doi.org/10.54518/RH.5.6.2025.907

Sjarlis, S., Maryadi, M., Oktaviani, A. R., Abadi, I., Ramadhani, N. Y., & Faulan, A. (2025). Breaking the silent voices: Advancing accountability through dialogic accounting in Indonesian local governance. *Public Money and Management*. https://doi.org/10.1080/09540962.2025.2499958;CSUBTYPE:STRING:AHEAD

Xu, F., Qin, J., Zhang, D., & Zhang, W. (2026). Linking organizational AI adoption to employee knowledge behaviours: the influences of appraisals and locus of control. *Humanities and Social Sciences Communications 2026 13:1*, *13*(1), 471-. https://doi.org/10.1057/s41599-026-06829-5